

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis *Good Governance* di Kota Probolinggo. Tugas akhir ini mencoba untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau, dan pendapat ahli terhadap konsep *good governance*. Berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat dan pendapat ahli maka dihasilkan strategi pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun kesimpulan yang didapatkan antara lain:

#### 5.1.1 Karakteristik dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Probolinggo

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007, bentuk ruang terbuka hijau yang terdapat di Kota Probolinggo terdiri dari: taman kota, taman rekreasi, hutan kota, taman lingkungan perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, pemakaman umum, lapangan olahraga, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan, sempadan sungai dan pantai, jalur pengaman jalan, median jalan dan rel kereta api.
- Fungsi RTH di Kota Probolinggo terbagi menjadi fungsi sosial dan fungsi ekologis. Fungsi sosial seperti sebagai sarana komunikasi sosial, tempat bermain, tempat rekreasi dan sarana hiburan bagi masyarakat kota, sedangkan fungsi ekologis seperti sebagai penyegaran udara, penyerap air hujan, pengendali banjir dan pengendali polusi.
- Perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo dituangkan dalam beberapa dokumen kebijakan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Master Plan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dan Rencana Tata Ruang Kawasan Terbuka Hijau. Luasan RTH di Kota Probolinggo saat ini telah memenuhi standar UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 yaitu 30% dari luas wilayah. Namun ada kekurangan RTH publik yang masih di bawah standar 20%.
- Beberapa lembaga yang terkait dengan ruang terbuka hijau yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai perencana ruang terbuka hijau dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) pelaksana pembangunan dan pengelola

ruang terbuka hijau terutama ruang terbuka hijau publik. Selain dari instansi pemerintah, pengelolaan RTH juga didukung oleh pihak swasta yaitu LSM lingkungan hidup dan pelaku industri di Kota Probolinggo serta didukung pula oleh masyarakat Kota Probolinggo.

- Sumber daya manusia dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo berasal dari Badan Lingkungan Hidup termasuk untuk pemeliharaan dan perawatan ruang terbuka hijau yang meliputi penyiraman, pemangkasan dan penebangan pohon-pohon yang rawan menyebabkan bencana, Badan Lingkungan Hidup memiliki tenaga-tenaga terlatih yang bertugas di lapangan.
- Pengambilan keputusan dalam pengelolaan RTH, antar instansi pengelola RTH tidak saling terlibat, hanya saja dalam pengambilan keputusan tersebut tetap menggunakan pedoman dan rencana yang telah dibuat serta tiap instansi saling koordinasi agar pengembangan yang dilakukan tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Dana yang digunakan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Probolinggo berasal dari dana alokasi khusus (DAU) dan dana lain-lain. Besar dana yang dianggarkan untuk pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo kurang lebih sebesar 6 (enam) milyar.

### **5.1.2 Penerapan Konsep *Good Governance* dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Probolinggo**

- Transparansi yang hingga saat ini telah dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo antara lain: kemudahan akses bagi akademisi untuk mendapatkan data mengenai perencanaan ruang terbuka hijau Kota Probolinggo, adanya radio Suara Kota dan tabloid Suara Kota yang menjadi sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan hasil-hasil pembangunan ruang terbuka hijau, adanya koordinasi antar lembaga yang mengelola ruang terbuka hijau, sehingga dapat menghindari adanya ketidaksesuaian program-program pengelolaan ruang terbuka hijau.
- Akuntabilitas pemerintah Kota Probolinggo dalam pengelolaan ruang terbuka hijau diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban proyek-proyek atau program-program pemerintah yang berupa perencanaan, pembangunan maupun perawatan ruang terbuka hijau.
- Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dapat dilihat dari seberapa jauh keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan RTH,



perencanaan dan evaluasi RTH dan sumbangan untuk pemeliharaan RTH. Program-program pemerintah dalam pengelolaan RTH yang melibatkan masyarakat berupa program-program lingkungan hidup, misalnya lomba kampung bersih, lomba kelurahan bersih, kerja bakti, dan lain sebagainya.

- Prinsip *good governance* belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo, meskipun telah ada usaha dari pemerintah Kota Probolinggo. Berdasarkan variabel *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, transparansi dan partisipasi telah diupayakan oleh pemerintah Kota Probolinggo untuk dilaksanakan namun sistem yang dikembangkan belum berjalan dengan baik, sedangkan akuntabilitas masih belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Kota Probolinggo.

### **5.1.3 Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang Akan Diterapkan di Kota Probolinggo Berbasis *Good Governance***

Strategi pengelolaan ruang terbuka hijau yang akan diterapkan di Kota Probolinggo disusun berdasarkan analisis IPA dan AHP yang terdiri dari strategi peningkatan kondisi dan perencanaan ruang terbuka hijau serta strategi peningkatan *good governance* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Strategi peningkatan kondisi dan perencanaan ruang terbuka hijau diprioritaskan pada perbaikan kondisi taman lingkungan perumahan dan kondisi taman kota. Sedangkan strategi peningkatan *good governance* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau diprioritaskan pada transparansi informasi pengelolaan RTH.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan temuan yang didapat dalam studi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis *Good Governance* di kota Probolinggo, maka saran yang dapat diajukan yaitu:

- Perlunya penerapan prinsip *good governance* secara menyeluruh dalam sistem pemerintahan Kota Probolinggo terutama yang dibahas dalam studi ini yaitu pengelolaan ruang terbuka hijau, agar dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dapat terwujud keseimbangan pelaksanaan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
- Peran serta masyarakat dan swasta sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan program-program pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo.

- Disarankan adanya studi lebih lanjut mengenai pengelolaan tiap bentuk ruang terbuka hijau sehingga pengelolaan ruang terbuka hijau yang terdiri dari perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan dapat dibahas lebih detail berdasarkan bentuk ruang terbuka hijau.

